MAY DAY HARI LIBUR JAM KERJA

Peringatan dan Perayaan 1 Mei di Indonesia dari 1918 hingga 2015

SYARIF ARIFIN

May Day, Hari Libur, Jam Kerja:

Peringatan dan Perayaan 1 Mei di Indonesia dari 1918 hingga 2015

Syarif Arifin

May Day, Hari Libur, Jam Kerja:
Peringatan dan Perayaan 1 Mei di Indonesia dari 1918 hingga 2015
Syarif Arifin. Bogor. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane. 2016
29 hlm ; 20 cm.

Cetakan Pertama, 2016

Penulis: Syarif Arifin
Editor: Tim LIPS
Layout Isi: Anomim
Desain Sampul: Anomim

Diterbitkan Pertama Kali dalam Bahasa Indonesia Oleh:
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)
Jl. Dewi Sartika No. 52 F, Pasar Anyar, Kec. Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telepon: (0251) 8344473
Website: majalahsedane.org
Email: info@lips.or.id

May Day, Hari Libur, Jam Kerja:
Peringatan dan Perayaan 1 Mei di Indonesia dari 1918 hingga 2015[1]

Syarif Arifin
Bergiat di LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane)

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan mengenai peringatan May Day *di Indonesia sejak pra-Kemerdekaan hingga ditetapkannya kembali 1 Mei sebagai hari libur nasional, pada 2013. Selain memperlihatkan watak internasionalisme gerakan buruh, 1 Mei menjadi ajang penting mengekspresikan berbagai persoalan perburuhan. Dalam konteks itu pelarangan 1 Mei di zaman Soeharto, meski pada masa Kemerdekaan 1 Mei menjadi hari raya besar bagi masyarakat umum, merupakan upaya menghapus jejak metode perlawanan buruh dan menundukkan buruh dalam skema pelipatgandaan keuntungan. Tulisan ini memperlihatkan pula mengenai perbedaan penting mengenai pengakuan 1 Mei di masa Kemerdekaan dan di Era Reformasi. Dengan menguatnya rezim pasar kerja fleksibel, perlu memikirkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk memajukan hak-hak dasar buruh.*

Hari Solidaritas Internasional: Pengantar

Mulai 2014, tuntutan 1 Mei sebagai hari libur nasional tidak terlihat lagi di spanduk maupun poster-poster buruh. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2013 mengakui 1 Mei sebagai hari libur nasional. Di Bekasi Jawa Barat, saat saya mengikuti aksi peringatan *May Day* 2013, berita tersebut tersebar cepat melalui media sosial, dari mulut ke mulut, diumumkan di mobil komando,[2] dan disambut sorak sorai peserta demonstrasi. Di saat bersamaan, banyak pihak menerka akan lebih sulit mengorganisasikan buruh-buruh yang memilih libur atau dipaksa bekerja di hari bersejarah tersebut.

Peliburan 1 Mei di Indonesia membantah keyakinan bahwa hari tersebut sebagai hari rayanya negara-negara atau orang-orang Sosialis atau Komunis. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia merupakan negara kesembilan yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur untuk memeringati Hari Buruh Internasional. Peringatan 1 Mei terjadi di 96 negara di Benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia, sebagai hari raya bersama maupun sebagai hari libur.[3]

Dewasa ini serikat-serikat buruh di Indonesia semakin akrab dengan istilah Hari Buruh Internasional, *Labor Day*, *May Day*, *International Labor Day* atau *Internasional Workers Day*. Sebulan atau dua minggu menjelang 1 Mei serikat-serikat buruh bersiap menyambut hari dengan rapat, pemutaran film, diskusi dan menggalang kerjasama antarorganisasi. Untuk menyambut 1 Mei, serikat-serikat buruh dipastikan akan membuka kembali lembaran sejarah pemogokan dan

---

[1] Tulisan ini merupakan pengembangan dari tulisan saya sebelumnya dengan judul*, May Day, Hari Libur, dan Jam Kerja: Peringatan dan Perayaan 1 Mei di Indonesia dari 1918 hingga 2013.*

[2] Mobil komando adalah mobil bak terbuka disertai dengan soundsystem lengkap dan panggung kecil yang terbuat dari kayu.

[3] Lihat. *International Workers' Day.* https://en.wikipedia.org/wiki/International_Workers'_Day

demonstrasi di Lapangan Haymarket Chicago Amerika Serikat, pada 1-4 Mei 1886. Namun, kisah “Pembantaian Haymarket” seringkali disalahpahami dan disebut sebagai hari kemenangan 8 jam kerja. Selain itu, jarang sekali mendiskusikan peringatan 1 Mei di Indonesia. Padahal, sebelum ditetapkan pada 2013, pada 1948 Indonesia telah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur, yang diperingati secara meriah dan penuh semangat.

Pengakuan 8 jam kerja bukan pada 1886. Peristiwa Haymarket adalah peristiwa pembantaian, yang ditetapkan sebagai hari solidaritas internasional pada 1889. Gerakan tersebut merupakan rangkaian dari “Gerakan Pengurangan Jam Kerja (*Short-time Movement*) dan “Gerakan Delapan Jam Kerja (*Eight-hour Movement*)” menuntut pengurangan jam kerja, melarang buruh anak atau pembatasan usia kerja, dan kondisi kerja yang aman, dan kenaikan upah.[4]

Di tiap negara, 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional dan pengurangan jam kerja, pembatasan usia kerja, perlindungan upah, dan jaminan keamanan kerja diakui bertahun-tahun setelah peristiwa Haymarket. Di Chicago, tempat peristiwa tersebut berlangsung, 8 jam kerja diakui pada 1938.[5] Bahkan, Amerika Serikat menetapkan minggu pertama September sebagai Hari Buruh, bukan pada 1 Mei. Baru-baru ini Pemerintah Amerika Serikat berupaya membelokan 1 Mei sebagai sebagai *Law and Order Day*, bukan Hari Buruh Internasional.[6]

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengakui 8 jam kerja pada 1919 dan pengakuan jenis pekerjaan yang aman bagi perempuan pada 1935. Indonesia mengakui 8 jam kerja, 1 Mei sebagai hari libur tanpa pengurangan upah, larangan buruh anak, dan lain-lain pada 15 Apri 1948 melalui UU (Undang-Undang) Kerdja. Pengakuan 1 Mei sebagai libur di masa Kemerdekaan, otomatis dicabut ketika keluar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.[7] Dengan demikian, kita dapat mengembangkan pikiran bahwa para pemimpin serikat buruh yang terlibat dalam perumusan undang-undang tersebut tidak menganggap penting 1 Mei sebagai hari solidaritas internasional.

Peristiwa lain yang melatari Tragedi Haymarket adalah debat hebat para intelektual perburuhan, setelah 15 tahun keruntuhan Komune Paris dan Internasional I. Hal tersebut menandai menguat dan meluasnya kapitalisme di dataran Eropa dan merangksek ke Benua Amerika. Di masa itu, para intelektual perburuhan terbelah pada dua arus utama, yakni kalangan yang mengusulkan pendudukan langsung pabrik-pabrik untuk membebaskan buruh dari ikatan penghisapan; dan kalangan yang mengusulkan perjuangan bertahap pengurangan jam kerja melalui pengakuan negara. Di saat bersamaan serikat buruh mengalami konservatisme karena menolak mengorganisasikan buruh-buruh ‘tidak terampil’, yang jumlahnya kian meluas.

Para peserta Haymarket justru berasal dari buruh-buruh ‘tidak terampil’. Peristiwa berdarah tersebut menjadi media konsolidasi pegiat perburuhan di masa

---

[4] Robin Bachin. *The Haymarket Martyrs' Monument as a Labor Icon*. Tersedia online: http://www.illinoislaborhistory.org/labor-history-articles/the-haymarket-martyrs-monument-as-a-labor-icon

[5] John B. Jentz. Eight-Hour Movement. Tersedia: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/417.html

[6] Eric Chase. The Brief History of May Day. 1993. Tersedia online: http://www.iww.org/history/library/misc/origins_of_mayday

[7] Lihat Pasal 192 UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 7.

itu, sehingga dicanangkan sebagai hari solidaritas internasional menjelang pembentukan Internasionale II.[8] Pelajaran penting lain dari kemunculan gerakan buruh di Haymarket adalah munculnya model serikat buruh baru (*new unionism*) yang " ... mulai menyeret serikat buruh lama yang kaya dan sombong".[9]

Tulisan ini akan mendiskusikan, *pertama*, bagaimana gagasan 1 Mei dan politik jalanan menyebar ke serikat-serikat buruh di Indonesia. Seperti diketahui, beberapa serikat-serikat buruh di Era Reformasi mewarisi watak keserikatburuhan yang dibentuk oleh Soeharto, yang secara *inhern* anti-1 Mei. Bagi serikat yang dikendalikan oleh Soeharto, hari buruh adalah 20 Februari dan perundingan adalah ideologi utama untuk menyelesaikan persoalan perburuhan. Namun, alam demokrasi, ketersediaan informasi, dan akses terhadap informasi telah mendobrak sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada masa otoriter.

Kedua, akan diperlihatkan bagaimana kerangka utama pelarangan 1 Mei di zaman Soeharto. Dalam konteks Hari Buruh Internasional, Soeharto tidak mencabut UU Nomor 12 Tahun 1948, di mana 1 Mei dinyatakan sebagai hari libur, namun dengan jitu mempreteli watak internasionalisme gerakan buruh dengan menetapkan 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional dan menanamkan ideologi harmonisme dalam kurikulum pendidikan serikat buruh.

Ketiga, mendeskripasikan peringatan 1 Mei di masa pra-Kemerdekaan, sebagai bagian integral dari perjuangan kemerdekaan. Di bagian ini akan diperlihatkan bagaimana 1 Mei merupakan salah satu momentum di kalangan pergerakan dengan berbagai kecenderungan ideologi untuk memperjuangkan kenaikan upah dan mengurangi jam kerja, sekaligus mengusir penjajah Belanda dan Jepang.

Keempat, akan memperlihatkan bagaimana peringatan 1 Mei diperingati oleh serikat-serikat buruh di masa Kemerdekaan. *Kelima*, tulisan ini menutup diskusi dengan mengetengahkan diperbandingkan makna peliburan 1 Mei pada 2013 dalam hubungannya dengan pasar kerja fleksibel.

---

[8] Lihat The International Working Men's Association. *Resolutions of the Congress of Geneva, 1866, and the Congress of Brussels, 1868.* London. The Westminster Printing Company, 5 6, and 122, Drury Lank, W.C.

[9] George Novack. Sejarah Internasional Pertama dan Internasional Kedua. Terj. Abdul Syukri. 1999. Tersedia: https://www.marxists.org/indonesia/archive/novack/001-2.htm

Peringatan 1 Mei di Era Reformasi

Setidaknya, sejak 2008, hampir seluruh serikat buruh di Indonesia menggunakan 1 Mei sebagai ruang untuk mengungkapkan persoalan perburuhan ke khalayak umum. Media-media massa pun diwarnai berita-berita peringatan 1 Mei. Peringatan Hari Buruh Internasional berlangsung di kantor-kantor pemerintah, kawasan industri, jalan raya, dan bandar udara internasional, dan tempat-tempat publik lainnya. Di spanduk, baligo, poster, selebaran, dan pernyataan sikap tak kurang enam sampai sebelas tuntutan terpampang. Dari sederet tuntutan tersebut, yang selalu muncul adalah untutan 1 Mei sebagai libur nasional. Serikat buruh kerap tampil bersama kelompok sosial lainnya dengan membangun aliansi atau mengusung bendera masing-masing.

Penulis akan membagi peringatan 1 Mei di Era Reformasi menjadi dua periode, yaitu pra-2006 dan pasca-2006. Tahun 2006 menjadi tonggak utama karena pada tahun tersebut hampir seluruh serikat buruh menggunakan 1 Mei untuk berdemonstrasi dan mengemukakan persoalan perburuhan. 1 Mei merupakan momentum pertemuan tuntutan dan sasaran demonstrasi untuk membangun kerjasama atau aliansi. Sebuah aliansi terkadang dibangun untuk merespons-cepat sebuah peristiwa, yang kemudian dipergunakan kembali pada *May Day* dan aliansi yang dibangun hanya untuk menyambut peringatan *May Day*.[10] Aliansi merupakan jembatan bertemunya berbagai serikat buruh dengan beragam gagasan. Ada Aliansi yang dibangun dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah, tapi jarang sekali Aliansi dibangun dari bawah kemudian ke atas. Dalam sebuah keanggotaan Aliansi, terkadang organisasi organisasi tingkat pusat menyerukan organisasi tingkat bawah membuat Aliansi yang sama. Namun, dapat juga berlaku keadaan yang berbeda; Organisasi tingkat atas bergabung di sebuah Aliansi, organisasi tingkat bawah tidak terlibat bahkan menolak bergabung.

Tahun 2006 menjadi tonggak penting peringatan 1 Mei oleh serikat-serikat buruh dengan pelbagai kecenderungan politik. Berkenaan dengan sikap serikat buruh terhadap 1 Mei dapat dibagi pada serikat buruh yang anti-1 Mei, serikat buruh yang bersikap netral terhadap 1 Mei, dan serikat buruh yang mengusung 1 Mei sebagai salah satu tuntutan.

Pada 2006, pemerintah meyakini perlu merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. UUK dianggap kurang fleksibel dan tidak ramah investasi sehingga perlu diperlonggar lagi. Maksud tersebut telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Revisi UUK melibatkan akademisi dari lima perguruan tinggi (Unpad, UGM, UI, USU, Unhas).

Ada lima belas pasal yang direvisi. Di antaranya, perluasan dan lamanya kontrak jangka pendek, mengenai kemudahan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan nilai pesangon, dan lain-lain. Di tahun itu pula, setelah

[10] Di kalangan serikat buruh ada beberapa istilah yang sering dipertukarkan untuk melakukan kerjasama; front, aliansi, koalisi dan forum, bahkan ada yang sama sekali tidak menggunkan istilah-istilah tersebut. Dalam perbincangan teoretik penamaan-penamaan tersebut seringkali dikaitkan dengan luas dan sempitnya tuntutan dan keanggotaan organisasi di dalamnya. Ada juga yang mencoba membedakannya dengan penamaan aliansi strategis dan taktis. Ketika nama kerjasama politik menjadi organisasi yang berdiri sendiri, istilah tersebut seringkali kabur. Di sini hanya akan dipergunakan istilah Aliansi.

tertunda selama dua tahun, pengadilan hubungan industrial (PHI), yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan perburuhan secara cepat, murah, sederhana, dan adil, mulai beroperasi. Namun, serikat buruh dengan segera mendapatkan hasilnya. Pengadilan tersebut kaku, mahal, dan tidak memiliki hari depan bagi buruh.[11] Setahun sebelumnya, keluar Keputusan Menteri mengenai pencapaian upah layak Nomor 17, menggantikan perhitungan upah kebutuhan hidup minimum (KHM) yang berlaku dari 1996-2005. Di tingkat yang lebih umum, tahun 2005 pemerintah mendaku telah membubarkan CGI (*Consultative Group on Indonesia*) dan melunasi hutang kepada dana moneter internasional (IMF/*International Monetery Fund*).

Pada dasarnya UUK merupakan salah satu bahan perdebatan di kalangan serikat buruh, terutama menyangkut pasal-pasal buruh kontrak, penyediaan jasa tenaga kerja, dan pemborongan pekerjaan.[12] Sebagian serikat buruh meyakini bahwa UUK tersebut bermaksud melindungi buruh kontrak dan *outsourcing;*[13] dan sebagian lagi menyebutnya melegitimasi, bahkan melahirkan 'perbudakan modern'. Di luar perdebatan tersebut, di tingkat perusahaan terjadi gejala perubahan hubungan kerja dari buruh tetap ke buruh tidak tetap dengan berbagai model, seperti pemutihan, peremajaan, rasionalisasi dan lain sebagainya. Rencana revisi UUK seolah membakar keresahan buruh.[14]

Atas rencana revisi UUK 13, serikat buruh protes. Tiga hari sebelum 1 Mei, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menginstruksikan anggotanya untuk menggelar Hari Buruh Sedunia dengan mengusung penolakan revisi UUK Nomor 13 Tahun 2003. Di berbagai media massa, pimpinan KSBSI menegaskan bahwa 1 Mei bukan harinya orang Komunis. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menginstruksikan anggotanya untuk menolak revisi UUK. Namun dilaksanakan pada 3-5 Mei.

Selain serikat-serikat di atas, di 1 Mei 2006 hadir aliansi buruh menggugat (ABM). ABM menyerukan mogok nasional untuk menolak revisi dan menuntut pencabutan UUK Nomor 13. Anggota ABM adalah campuran dari serikat-serikat buruh 'lama', pecahan dari serikat buruh 'lama' dan serikat-serikat buruh 'baru'. [15] Tak kurang 49 organisasi buruh bergabung di ABM. Dengan cepat ABM menjadi aliansi yang diperhitungkan dengan mengorganisasikan jaringannya di 16 provinsi. Pada Konferensi I Juli 2006, ABM merumuskan isu-isu yang lebih luas, seperti penghapusan hutang luar negeri, nasionalisasi aset-aset vital yang dikuasai asing, industrialisasi nasional dan pemberantasan KKN. Di tubuh ABM ada dua organisasi yang cukup diperhitungkan karena struktur anggotanya berada di beberapa wilayah,

---

[11] Catatan Wawancara dengan Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi Asep Djamaludin, 13 dan 14 Mei 2013.

[12] Munculnya UUK 13 dan UU PPHI tidak disertai dengan naskah akademis. Lihat keterangan rincinya dalam Jafar Suryomenggolo. *Dinamika Perumusan UU Ketenagakerjaan dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Apa, Siapa dan Bagaimana*. Discussion Paper No. 1. Jakarta. TURC. Cetakan II April 2007

[13] Istilah *outsourcing* tidak dikenal dalam peraturan perundangan dan hanya popular di beberapa serikat buruh. Istilah tersebut semakin dikenal setelah 2006 dengan munculnya tuntutan Hostum; hapus *outsourcing* tolak upah murah!

[14] Laporan Diskusi, "Strategi Menghadapi Buruh *Outsourcing*," di Kawasan Bekasi. LIPS dan Akatiga, 3/21/2011

[15] Beberapa pengamat perburuhan membagi keberadaan serikat buruh berdasarkan kronologi pendiriannya menjadi kelompok SPSI, kelompok eks-SPSI, dan kelompok non-SPSI. (Lihat Kosuke Mizuno, dkk. Direktori Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia. Hal. 5-17. 2007. Bandung dan Jepang. Akatiga dan CSEAS

yakni Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Foto: Poster ABM 2006. Ajakan melakukan mogok nasional untuk menolak revisi dan mencabut UUK Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Sumber: Koleksi Khamid Istakhori di Perpustakaan Perburuhan LIPS.

Peringatan 1 Mei 2006 mencekam. Saat itu, Jakarta dinyatakan dalam keadaan siaga I. Status tersebut berlangsung sampai 21 Mei. Hal tersebut dikonkretkan dengan mengerahkan 15.000 aparat kepolisian, 5.000 TNI, 7.000 petugas Tramtib, 4.000 polisi pamong praja, dinas kesehatan dan dinas perhubungan, dua helikopter TNI-AU. Selain itu, 50 ribu anggota gabungan organisasi kepemudaan (OKP) pun dikerahkan. OKP tersebut terdiri dari FBR, Forkabi, pemuda panca marga, PP, FPI, macan kemayoran, FKPPI, dan AMPI. Pada 2013, Kapolda Metro Jaya menurunkan 25.332 personel gabungan, berasal dari TNI/Polri.

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan, 1 Mei merupakan hari liburnya negara-negara Komunis. Sementara anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Yahya Zaini mengatakan, 1 Mei tidak layak dijadikan hari libur karena ciptaannya Karl Marx.

Pada 2006, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menuduh protes buruh bermuatan politik dan mengganggu produktivitas perusahaan. Menurut Ade, demonstrasi tersebut akan membuat investor lari ke Vietnam dan Thailand.

1 Mei 2006 diperingati di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat dua slogan yang diungkapkan secara berbeda, yaitu Aliansi yang membahasakan Tolak Revisi UUK 13/2003; dan Aliansi yang membahasakan Tolak UUK 13/2003 dan Revisinya. Di Jakarta 1 Mei diikuti lebih dari seratus ribu orang. Peringatan 1 Mei dilakukan juga di Jawa Tengah (Surakarta, Semarang), Jawa Barat (Bandung, Bogor, Depok, Cianjur, Karawang), Jawa Timur (Malang, Surabaya), Banten (Tangerang), Sumatera Utara (Medan), DIY Yogyakarta (Yogyakarta), Lampung, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau (Batam), dan Sulawesi Selatan (Makassar). Di daerah-daerah tersebut jumlah keterlibatan massa bervariasi dari seratus orang hingga sepuluh ribu orang. Sasaran aksi protes adalah badan-badan pemerintah dan kantor DPR. Di tahun ini, serikat-serikat perusahaan negara maupun perkebunan tampak tidak muncul dalam peringatan 1 Mei.

Penjelasan lain mengenai 2006 sebagai momentum persatuan adalah masih jauhnya perhelatan Pemilu, sehingga mengurangi derajat perdebatan mengenai strategi dan taktik dalam memandang Pemilu. Di serikat-serikat buruh, perlu-tidaknya mengintervensi Pemilu merupakan diskusi tersendiri. Diskusi tersebut tak jarang mengambil bentuk kesulitan membangun kerjasama, bahkan mendorong pendirian organisasi baru.

Pada 2006 pun serikat-serikat buruh tampak dapat melewati berbagai kemelut internal. Pada tahun 2006, anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mencapai 2 juta orang, setelah mengalami perpecahan pada 2003. SBSI dideklarasikan pada April 1992 di Bogor Jawa Barat.

SBSI mencetak sejarah perlawanan buruh dengan tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) di Medan pada 1994. Setelah peristiwa tersebut, rezim Soeharto menghajar serikat tersebut dengan memenjarakan pimpinannya, dan sekitar lima ribu anggotanya dipecat oleh manajemen pabrik. Setelah Soeharto terjungkal, Ketua SBSI Muchtar Pakpahan, didera kasus dugaan korupsi dana Jamsostek dan mendorong beberapa pucuk pimpinannya yang lain mendirikan SBSI 1992. Pada 2003, SBSI mendaftarkan diri sebagai konfederasi.

Unsur lain yang terlibat dalam 1 Mei 2006 adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI adalah 12 serikat buruh yang keluar dari SPSI dan mendirikan SPSI Reformasi pada Oktober 1998. SPSI Reformasi mengalami perpecahan lagi. SP LEM keluar dari SPSI Reformasi dan mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada 6 Februari 1999 dan sebagian besar FSP TSK Reformasi mendirikan Serikat Pekerja Nasional (SPN), pada 6 Juni 2003.

Di pojok lain, SPSI Refomasi yang didirikan pada Oktober 1998 serta mengimpun sebelas sektor dari FSPSI sedang dilanda kegoncangan dan ditambah tidak memiliki pandangan positif mengenai 1 Mei. SP LEM keluar dari SPSI Reformasi dan mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada 6 Februari 1999 dan sebagian besar FSP TSK Reformasi mendirikan Serikat Pekerja Nasional (SPN), pada 6 Juni 2003.

Sebelum 2006, peringatan 1 Mei hanya popular di serikat-serikat buruh yang didirikan di luar kendali Soeharto. Lima tahun setelah 20 Februari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Nasional, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) memperingati 1 Mei dengan cara demonstrasi di Semarang dan Jakarta, pada 1995.

Di Semarang demonstrasi diikuti oleh 1000 buruh dan 250 mahasiswa. PPBI menuntut kebebasan berorganisasi, pencabutan dwi fungsi ABRI, dan kenaikan upah minimum dari Rp3.200 per hari menjadi Rp7.000 per hari. Sementara di Jakarta, peringatan tersebut diikuti oleh sekitar 85 orang. Dua protes tersebut dibubarkan aparat keamanan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa pemimpin aksinya pun ditangkap.

Di bawah penindasan keji rezim Soeharto, PPBI melancarkan berbagai demonstrasi dan pemogokan. PPBI yang dideklarasikan pada 1994 di Semarang hanya bertahan hingga 1996. PPBI muncul kembali pada 1999 dengan nama FNPBI, setelah deklarasi pada 14-16 Mei 1999 di Bandung Jawa Barat. Saat itu, FNPBI

menghimpun sembilan belas serikat buruh. FNPBI dengan cepat menjadi organisasi yang cukup berpengaruh serta mampu merespons dinamika perburuhan di tingkat nasional.

Perlu ditekankan, penindasan terhadap PPBI maupun terhadap SBSI merupakan skenario umum rezim Soeharto untuk meredam gejolak pemogokan, yang terus meningkat di periode 1990-an. Seperti diperlihatkan dengan pembunuhan terhadap Marsinah dan pemecatan 13 orang kawannya, berbagai pemogokan didorong oleh berbagai pelanggaran hak dasar buruh, seperti upah minimum yang tidak naik, THR yang tidak dibayar, dan pemecatan sewenang-wenang. Sehingga tindakan keji Soeharto tidak menyurutkan berbagai pemogokan di tempat lain, seperti di Solo, Bandung, Surabaya, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Seperti diindikasikan Patrick Quinn (2003: 71), dari 1980-2002, pemogokan melesat tajam diperiode 1996 hingga mencapai angka 360 kali. Pada 1994 haya terjadi 296 pemogokan dan pada 1995 hanya 276 pemogokan. Angka tersebut jauh melebihi masa-masa awal industrialisasi maupun tahun-tahun pengunduran diri Soeharto. Di awal industrialisasi, 1980, pemogokan hanya mencapai 100 kali. Sepuluh tahun kemudian, 1990, hanya 61 kali terjadi pemogokan. Pada 1998, terjadi 278 kali pemogokan dan 220 pemogokan pada 2002.

Selain FNPBI, serikat-serikat buruh yang memperingati *May Day* pra-2006 adalah serikat-serikat, yang disebut Vedi Hadiz sebagai serikat buruh yang didampingi oleh aktivis *low profile*, atau dalam istilah lain adalah serikat yang dibangun oleh aktivis Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) di dasawarsa 1990-an atau serikat non-SPSI. Sebagian dari serikat tersebut mencoba membangun Sindikasi Gerakan Buruh Indonesia (SGBI) dan sebagian lagi menjalin kontak dalam Jaringan Buruh Antar Kota (JBAK). Kecuali kiprah beberapa anggotanya, seperti Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), aktivitas SGBI nyaris tidak muncul. JBAK adalah embrio dari KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia).

Pada 1999, peringatan Hari Buruh Sedunia diisi dengan demonstrasi dengan membawa tuntutan kenaikan upah 100 persen, menolak PHK, dan menuntut 1 Mei sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, di tahun inilah serikat-serikat buruh non-SPSI menuntut peliburan 1 Mei, sebagai hari libur nasional. Selain merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Nomo 12 Tahun 1948, tidak ditemukan alasan lain menuntut peliburan 1 Mei.

Dengan tuntuntan yang tidak jauh berbeda, 1 Mei 2000, diperingati di Jakarta dan di berbagai wilayah. Di antaranya di Semarang, Malang, Surabaya, Jember, Bandung, dan Makassar. Dalam peringatan tersebut muncul juga tuntutan transparansi penggunaan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Pada 2000-2003, aliansi yang cukup menonjol adalah Komite Aksi Satu Mei. Tidak kurang dari 53 organisasi buruh tergabung di dalamnya. Selain serikat-serikat buruh regional yang didirikan secara independen, Komite Aksi Satu Mei berhasil mengorganisasikan serikat-serikat buruh yang keluar dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) maupun masih dalam SPSI. Komite Aksi Satu menyerukan mogok nasional di 1 Mei dengan mengorganisasikan buruh dari Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Aksi protes dipusatkan di HI dan dan Istana Negara.

Dengan nama aliansi yang berbeda, peringatan 1 Mei terjadi juga di Bandung, Surabaya, dan Gresik. Beberapa tuntutan yang mengemuka adalah kenaikkan upah 100 persen, hapus sistem kerja kontrak, bubarkan IMF, 32 Jam kerja seminggu, adili dan bubarkan Golkar.

Tidak hanya di 1 Mei, Komite Aksi Satu Mei pun berhasil mengorganisasikan protes untuk membatalkan revisi Kepmennaker Nomor 150 Tahun 2000 oleh Pemerintahan Megawati. Kepmenaker tersebut rencananya akan direvisi karena dianggap terlalu melindungi buruh. Sebagai tambahan, pada 2001 muncul inisiatif membangun Komite Anti Penindasan Buruh (KAPB), yang melakukan konferensi nasional pada 2002. Tampaknya KAPB menghimpun kurang lebih 49 organisasi, yang merespons Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan. KAPB memperkenalkan istilah sistem alih daya atau *outsourcing* sebagai praktik perbudakan modern, di mana buruh tak lebih dari komoditas pasar.

Pada 2002, pemerintah mengomentari negatif peringatan dan tuntutan libur 1 Mei. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Ketua DPP KSPSI Jacob Nuwa Wea menyarankan 1 Mei dilakukan dengan seminar dan doa bersama bukan dengan demonstrasi dan pemogokan. Wapres Hamzah Haz, Ketua DPR RI Akbar Tandjung, dan Wakil Ketua DPR AM Fatwa mengatakan, jika 1 Mei libur, negara tidak produktif, karena Indonesia sudah terlalu banyak libur.

Dua bulan setelah pengesahan UUK Nomor 13 Tahun 2003, Komite Aksi Satu Mei menyambut *May Day* dengan menuntut pencabutan undang-undang tersebut, menolak PHK, menolak privatisasi badan-badan usaha negara, pembatalan kenaikan tarif dasar listrik, telepon, dan bahan bakar minyak (BBM), menghapus hutang lama dan menolak hutang baru.

Beberapa kasus yang mengemuka pada 2003 adalah pemecatan terhadap enam ribu buruh PT Dirgantara Indonesia. Buruh PT DI yang diasosiasikan sebagai buruh terampil, berpendidikan tinggi dan bekerja di perusahaan negara. Buruh PT DI memperluas metode protes jalanan. Dengan menggunakan sepeda motor buruh PT DI menerobos jalan Tol Cipularang dari Bandung ke Jakarta serta menggelar panggung protes di perempatan Patung Husein Sastranegara Bandung.

Pada 1999-2005, peringatan 1 Mei tidak hanya mengemukakan persoalan perburuhan. Serikat-serikat buruh akrab dengan tuntutan yang lebih luas, solidaritas untuk rakyat Aceh yang dikenai Darurat Militer pada 2004 dan mengenai hutang luar negeri Indonesia. Sasaran aksi protes tidak hanya Istana Negara dan DPR. Kantor Menko Polkam, Bank Indonesia dan kantor perwakilan IMF di Indonesia pun menjadi bulan-bulanan aksi protes.

Tidak ada informasi bagaimana Komite Aksi Satu Mei tergantikan oleh aliansi lain, pada 2005. Setelah itu, tuntutan pengurangan jam kerja tidak muncul dalam peringatan 1 Mei. Melenyapnya Komite Aksi Satu Mei pun menandai dinamika yang lain, yakni perdebatan dalam mengintervensi Pemilu.

Menjelang Pemilu 2004, SBSI bersama Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan FNPBI bersama PRD (Partai Rakyat Demokratik) merepons peluang tersebut. Di sisi lain, muncul Komite Aksi Serikat Buruh Independen (KASBI), yang merupakan

hasil pengorganisasian di tahun-tahun 1990-an. Kematian Marsinah menjadi momentum penting pengorganisasian tersebut sehingga terbentuk Jaringan Buruh Antar Kota (JBAK). JBAK membentuk Badan Pekerja Nasional Komite Aksi Serikat Buruh Independen (BPN KASBI), pada Maret 2003. Meski didera pengunduran diri beberapa anggotanya, seperti GSBI, SBTA Palembang, dan SBD Malang, KASBI muncul sebagai sebuah organisasi resmi setelah melaksanakan Kongres I pada 4-7 Februari 2005 di Bogor Jawa Barat yang diorganisasikan 25 serikat buruh di berbagai wilayah. KASBI adalah salah satu organisasi yang menumbuhkembangkan ABM di berbagai daerah di Indonesia.

Dari 2006-2009, ABM membawa dampak luar biasa bagi serikat buruh lain dengan munculnya tuntutan ‘upah layak nasional’. Pada *May Day* 2007, ABM telah menggelorakan tuntutan pembentukan undang-undang proburuh dan upah layak nasional. 1 Mei 2007 peringatan *May Day* diperingati di berbagai daerah dengan ‘bintang lapang’ ABM. Di Jakarta, ABM mengorganisasikan protes 20 ribu orang. Di Aceh dan Palembang, tak kurang dari seribu buruh turun berdemonstrasi. Sementara di Medan, Banten, Bandung, masing-masing menurunkan massa lima ribu orang. Di Semarang protes diikuti dua ribu buruh, di Yogyakarta 200 buruh, dan di Surabaya tiga ribu buruh.

Peringatan 1 Mei 2006 buruh yang tergabung dalam Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menolak revisi UUK Nomor 13 Tahun 2003. Foto: Hanna Abdullah, 2 Mei 2006. http://www.fotografer.net/personal/hannan

Setelah peringatan 1 Mei 2006, serikat-serikat buruh semakin akrab dengan Peringatan 1 Mei yang dilakukan dengan beragam metode. Serikat buruh tidak hanya memperingati hari tersebut dengan pawai dan demonstrasi. Di sebagian tempat ada yang memperingatinya dengan rapat akbar, donor darah, jalan santai, sunatan masal, dan lain-lain. Menariknya, seandainya 1 Mei jatuh di hari libur kantor

pemerintahan, serikat buruh akan tetap memperingati hari tersebut di hari lain.[16] Selain berorasi, menciptakan slogan dan yel-yel, para pekerja seni pun turut urun kemampuan dengan membuat pertunjukan kesenian, teatrikal, membacakan puisi, dan menyumbangkan nyanyian.

1 Mei 2001. 1. Tetapkan 1 Mei menjadi hari libur Nasional, 2. Adili dan Hancurkan Sisa-Sisa Orde Baru, 3. Stop PHK dan Sistem Buruh Kontrak, 4. Pengangguran akibat PHK, ditanggung oleh Pemerintah, 5. Hapuskan UMP/ UMPS diganti dengan Upah yang Layak bagi Buruh, 6. Jam Kerja menjadi 32 jam/minggu, 7. Buruh mendapat 20% dari laba perusahaan, 8. Bubarkan Depnaker/P4-D/P4-P dan bentuk Peradilan Buruh, 9. Stop monopoli Jamsostek, revisi UU No.3 / 1999, 10. Bentuk Dewan Pengupahan yang refresentatif, 11. Jamin kebebasan Berserikat, 12. Percepat Pemilu. 13.Tolak IMF (Komite Aksi Satu Mei Sumatera Utara. Tabloid Protes Mei 2001).
1 Mei 2002. Agar hari buruh ini menjadi lebih meriah, bawalah alat tabuh-tabuhan, bawalah umbul-umbul, bawa juga poster-poster tuntutan yang banyak. Ajak keluarga, bapak ibu, om tante, kakak adik, ajak juga tetangga dan kenalan sebanyak-banyaknya. Sebab semakin banyak KAUM BURUH DAN RAKYAT MISKIN YANG TERLIBAT, SEMAKIN KUAT TUNTUTAN KITA.
1 Mei 2003. Turun ke jalan 1 dan 2 Mei di Istana Negara. Cabut UU Ketenagakerjaan, tolak sistem kerja kontrak; Tolak RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI); Kembalikan 1 Mei Hari Buruh Sedunia sebagai libur nasional kaum buruh; Tolak Kenaikan harga BBM/TDL/Telepon/PAM; Segera turunkan harga-harga; Tolak rezim boneka imperialis (pemerintahan dan parlemen); Galang solidaritas buruh dan rakyat miskin negara-negara Dunia Ketiga. Sumber: Perpustakaan Perburuhan LIPS.

Peringatan *May Day* dengan cara lain dan cukup mencolok adalah *May Day Fiesta* pada 2008. *May Day Fiesta* diselenggarakan di Gelora Bung Karno dengan mengorganisasikan 20 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Kegiatan tersebut diorganisasikan dalam forum aliansi pekerja, yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN),

[16] 1 Mei 2010 dan 2011 jatuh pada hari Sabtu dan Minggu.

dan Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Metal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP LEM SPSI). Acara tersebut mampu menghadirkan grup band *Nidji*. Turut mengisi panggung adalah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Anggota DPR RI Suripto. Saat itu, keduanya menjabat sebagai petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena beberapa petinggi di forum aliansi pekerja pun menitipkan calon legislatifnya di partai tersebut untuk Pemilu 2009, kegiatan tersebut menjadi sasaran kritik sebagai upaya meraup suara Pemilu.[17] Ada dua penulis yang mengkritik kegiatan di atas melalui tulisan, *May Day: Perayaan atau Peringatan;*[18] dan *Mayday Fiesta: Terlalu Sengsara untuk Berpesta*.[19]

1 Mei 2008, pawai dan demonstrasi ABM menghiasai media massa nasional. Di luar ABM ada pula Front Perjuangan Rakyat (FPR), yang merupakan gabungan serikat-serikat buruh yang sempat bergabung di ABM. Meski tidak menggeser nama ABM, FPR masih dipergunakan sampai 2015. Di awal pembentukannya, FPR mengorganisasikan tak kurang dari 34 organisasi lintas sektor. FPR mengeluarkan slogan, upah, tanah, dan kerja. Selain di Jakarta, FPR terbentang dari Sulawesi dan Aceh.

Tahun 2008, *May Day* diperingati serentak di 24 kota/kabupaten. Di Jawa Barat protes dilakukan di Kota Bandung dan Kabupaten Garut. Jawa Tengah dilakukan di Purwokerto, Wonosobo, dan DI Yogyakarta. Di Jawa Timur dilakukan di Surabaya, Banyuwangi, Malang dan Jombang. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dilakukan di Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palu, Bulukumba, Donggala serta Kota Kendari.

1 Mei 2009, momentum Pemilu 2009 dan krisis keuangan global menjadi bahan tuntutan serikat-serikat buruh. Di Banten, serikat-serikat buruh menuntut pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena memberikan rekomendasi PHK kepada perusahaan yang pura-pura rugi. Di Kalimantan Barat, aliansi serikat buruh memperingati 1 Mei dengan menuntut lapangan kerja dan pemenuhan pesangon bagi buruh yang dipecat. Di Jakarta, ABM menuntut upah layak nasional, perlindungan bagi buruh dari pemecatan, penghapusan sistem kerja kontrak dan *outsourcing*. Di Kalimantan Timur Peringatan 1 Mei diikuti oleh 500 buruh dengan menolak Pemilu dan menolak PHK.

Setelah 2010, keharuman nama ABM nyaris lenyap, ketika tulang punggung organisasi tersebut, KASBI, menyatakan keluar.[20] Pada Mei 2010, KASBI menggalang aliansi dengan serikat-serikat buruh perusahaan negara seperti angkasa pura dan garuda Indonesia dengan membawa nama Gerakan Satu Mei (GSM). Di luar itu, muncul juga FORI (Front Oposisi Rakyat Indonesia), yang mengorganisasikan serikat buruh, serikat tani, organisasi lingkungan, dan organisasi perempuan.

---

[17] Said Iqbal Presiden FSPMI dan Bambang Wirahyoso Ketua Umum SPN tercatat sebagai calon legislatif dari PKS.

[18] Hilmar Farid. May Day: Perayaan atau Peringatan. Tersedia: http://hilmarfarid.com/wp/mayday-perayaan-atau-peringatan/

[19] Front Perjuangan Rakyat. *Mayday Fiesta: Terlalu Sengsara untuk Berpesta*. Tersedia: https://fprsatumei.wordpress.com/2008/05/01/mayday-fiesta-terlalu-sengsara-untuk-berpesta/

[20] Pernyataan Resmi Konfederasi KASBI keluar dari keanggotaan Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Nomor : 64/PP-KASBI/VI/2010. 16 Juni 2010. Diunduh dari https://groups.yahoo.com/neo/groups/jaringan_L2P/conversations/topics/2101.

Bersamaan dengan melayunya ABM, tahun 2010 KAJS mulai tampil dengan mengusung tema pengesahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia, dan jaminan dana pensiun wajib untuk buruh formal. Dalam selebarannya, KAJS didukung oleh 65 organisasi buruh, tani, dan mahasiswa. Secara umum aliansi tersebut terdiri dari SPSI dan mantan SPSI, di mana FSPMI tulang punggung utamanya. KAJS sukses mendorong pengesahan RUU BPJS, pada Oktober 2011. Rupanya, metode pawai dan demonstrasi tersebut cukup membekas bagi kalangan anggota KAJS dan seolah menggedor-gedor keyakinan lama mengenai 'perundingan' sebagai strategi utama menyelesaikan persoalan perburuhan.

May Day 2011, di Jakarta tampak beberapa aliansi. Setelah mengerahkan massa di depan Istana Negara, KAJS melakukan rapat akbar di Istora Senayan Jakarta dengan mengerahkan lebih dari 50 ribu orang. Di luar Senayan, ada Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI), FPR, dan FORI. Saat itu, PPRI mampu mengerahkan seribu buruh untuk memperingati 1 Mei.

Peringatan 1 Mei 2011 dilakukan dengan demonstrasi dan pawai di Banten (Serang dan Banten), Jawa Barat (Bandung, Karawang, Cirebon, Sukabumi, Bogor, dan Cianjur), Jawa Tengah (Sukoharjo, Solo, Semarang, dan Purwokerto), Sulawesi Selatan (Bulukumba dan Palembang), Sulawesi Tengah (Palu), Lampung, Bali, Kepulauan Riau (Batam), Yogyakarta, Sulawesi Selatan (Makassar). Beberapa buruh dari Bekasi, Bogor, dan Tangerang memperingati May Day di Jakarta. Para jurnalis yang terorganisasi dalam AJI melakukan aksi di Kediri, Aceh, Surabaya, di Bojonegoro.

Tahun 2011, setelah melaksanakan Kongres III di Bandung tampaknya merupakan masa-masa sulit bagi KASBI. Beberapa federasi wilayah KASBI menyatakan *disafiliasi* dan mengorganisasi diri dalam KSN, yang dirintis di awal-awal krisis keuangan global. Awalnya, KSN (Komite Solidaritas Nasional) menghimpun buruh-buruh di perusahaan negara dan perbankan, seperti PLN, Angkasa Pura, Garuda Indonesia, Bank Mandiri serta buruh-buruh di sektor manufaktur swasta. Kurang lebih 47 serikat buruh tergabung di KSN. Sebagian besar datang membawa persoalan pemecatan terhadap aktivis serikat. Pada 11 November 2011, KSN bertransformasi dari komite menjadi Konfederasi Serikat Nasional (KSN), meskipun tidak seluruh anggota KSN komite bergabung dalam KSN Konfederasi. Sebulan kemudian, beberapa anggota KSN turut membangun persatuan yang lebih luas, bersama organisasi tani, dan perempuan, dalam KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat).

Masa-masa sulit dialami pula oleh FNPBI. FNPBI mengalami gejolak cukup mendalam ketika menyikapi pertarungan Pemilu 2009, dan kerjasama politik PRD-Papernas dengan Partai Bintang Reformasi (PBR). Sebagian dari serikat buruh yang mengkritisi kerjasama tersebut membangun organisasi yang terpisah, yaitu KPRM PRD (Komite Persiapan Rakyat Miskin Partai Rakyat Demokratik). Pada 2010, mereka menggunakan nama Komite Persiapan Persatuan Perjuangan Buruh Indonesia (KP-PPBI).

KOMITE JAMINAN SOSIAL
UNTUK RAKYAT DAN PEKERJA/BURUH

Siaran Pers Komite Aksi Jaminan Sosial

Anggota :

1. FSPMI
2. KSPI
3. KOBAR
4. ALIANSI PETANI INDONESIA
5. DEWAN TANI INDONESIA
6. ALIANSI NELAYAN
7. KSPSI
8. FSP FPMI
9. FSP FARKES
10. ASPEK INDONESIA
11. FSP KEP
12. FSP PARIWISATA
13. FSP INDUSTRI SEMEN INDONESIA
14. FSP KAHUTINDO
15. FSP KEP KSPSI
16. FSP TSK KSPSI
17. FSP LEM KSPSI
18. FSP PERTANIAN PERKEBUNAN KSPSI
19. FSP LOMENIK KSBSI
20. FSP NIKEUBA KSBSI
21. OPSI
22. SP INDUSTRI KAPAL BUMN
23. SP DOK DAN PERKAPALAN BUMN
24. FK SPDI BUMN
25. GSPMII
26. SP POS INDONESIA BUMN
27. SPSI REFORMASI
28. FSP TSK
29. FORUM BURUH DKI
30. FORUM BURUH DEPOK
31. ALIANSI BURUH BOGOR
32. GMNI
33. HMI
34. MAHASISWA UNPAR
35. DEWAN BURUH JATENG
36. ALIANSI PEKERJA SUSEL-SULUT-GORONTALO
37. ABM – JATIM
38. ALIANSI BURUH JABAR
39. ALIANSI PEKERJA BANTEN
40. KOALISI SP / SB SUMUT – NAD
41. KOLIASI PEKERJA LAMPUNG
42. KOLIASI BURUH PAPUA
43. ALIANSI PEKERJA SE-KALIMANTAN
44. TURC
45. GARDA METAL
46. [illegible]

I. Landasan Hukum

Indonesia adalah Negara yang berideologi Pancasila. Sila kelima Pancasila adalah " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bentuk nyata keadilan sosial adalah jaminan sosial. Hal ini sudah dipertegas dalam UUD 1945 pasal 28 (H), dan diimplementasikan dalam UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang wajib diberikan seumur hidup kepada rakyat (termasuk pekerja/buruh) yang meliputi : Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kesehatan seumur hidup, dan jaminan pensiun. Dengan kata lain melalui pembahasan paket Revisi UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek dan Revisi UU BPJS di DPR RI dalam tahun 2010, maka Negara wajib memberikan jaminan sosial yang tidak diskriminatif dan limitatif, khususnya menjamin pembiayaan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, jaminan pensiun, dan Badan hukum BPJS (termasuk BPJS jamsostek) harus Wali Amanat.

II. Tuntutan

Komite Aksi Jaminan Sosial meminta DPR RI dan Presiden RI wajib mengesahkan satu paket pembahasan Revisi UU Jamsostek dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) di tahun 2010, dengan isi pokok-pokok pikiran harus berisi :

1. Jaminan Kesehatan harus seumur hidup dan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia (termasuk Pekerja/Buruh yang sudah tidak lagi bekerja).
2. Jaminan Pensiun seumur hidup bagi Pekerja/Buruh formal (tidak hanya untuk PNS/TNI/Polri saja).
3. Badan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS(termasuk BPJS Jamsostek) harus berbadan hukum Wali Amanat.
4. Organ BPJS (termasuk Jamsostek) terdiri dari : Dewan Wali Amanat (sebagai Pengawas) yang berunsurkan Tripartit dan Dewan Direksi yang berasal dari kalangan profesional.
5. BPJS (termasuk BPJS Jamsostek) harus menganut prinsip-prinsip; gotong-royong, nirlaba, akuntbilitas, kepesertaan wajib, kehati-hatian, keterbukaan, portabilitas, dana amanat, dan seluruh hasil pengelolaan dana Jamsos harus untuk peserta.
6. BPJS tidak wajib menyetor deviden dan pajak kepada pemerintah

III. AKSI MASSA

Aksi massa dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu akan digelar di 12 hingga 20 Provinsi dan lebih dari 100 Kab/Kota, aksi akan dilakukan setiap hari, mulai tanggal 5 April 2010 dan mencapai puncaknya pada tanggal 1 Mei 2010 yang akan mengerahkan ratusan ribu massa, aksi akan terus dilanjutkan hingga tuntutan dikabulkan oleh Presiden RI dan DPR RI.

" High Light"
Jaminan Sosial

- Jaminan Sosial Kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia.
- Jaminan pensiun seumur hidup bagi pekerja formal.
- Badan Hukum BPJS harus Wali Amanat, tidak lagi berbentuk BUMN dan atau PT.

Foto: KAJS menuntut jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melakukan aksi massa dari 5 April hingga 1 Mei 2010. Sumber: Perpustakaan Perburuhan LIPS.

Tahun 2012, *May Day* dilaksanakan di 20 provinsi; DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DIY Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bali, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darussalam, dan Papua Barat.

Pada 1 Mei 2012, serikat-serikat yang tergabung di dalam KAJS mendeklarasikan MPBI di Gelora Bung Karno dengan mengerahkan sepuluh ribu buruh dan mendatangkan grup band Slank. MPBI terdiri dari KSPSI, KSPI, KSBSI, dan serikat-serikat non-Konfenderasi. Pembangunan MPBI tersebut tampaknya mengikuti *merger*-nya tiga serikat buruh internasional, yakni ICEM (International Chemical Energy and Mining), ITGLWF (International Textile Garment and Leather Workers Federation), dan IMF (International Metalworkers Federation) dalam *Industri All*. Selain FPR, muncul juga Sekber Jabodetabek mengganti PPRI. Di Papua, lima ribu warga Papua menuntut Indonesia mengembalikan haknya yang dicaplok sejak 1961. Peringatan 1 Mei terjadi juga di Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, Makassar, Semarang, Pamekasan, Yogyakarta, Lampung Tangerang, Sumatera, Pekalongan, Sukabumi, Solo, Bandung, Subang.

Pada 2013, selain menuntut libur 1 Mei, serikat buruh menolak rencana kenaikan harga BBM, menolak RUU Ormas serta RUU Kamnas, dan menolak penangguhan upah. Selain itu, muncul tuntutan penghapusan *outsourcing* di BUMN. MPBI mengerahkan 150 ribu orang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Tercatat dua puluh provinsi memperingati hari tersebut. Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, peringatan dilakukan pula di Sumatera Utara (Medan), Sumatera Selatan (Muara Enim), Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan (Makassar), Kepulauan Riau (Batam, Karimun, Bintan), dan Maluku (Ambon). PT Freeport di Papua menyambut *May Day* dengan melakukan mogok kerja. Mogok kerja dilakukan juga oleh buruh di PT Bumi Sari Mas Indonesia Padang. Serikat buruh perkebunan di Sumatera Utara yang diwakili oleh SBPI (serikat buruh perkebunan Indonesia) mengorganisasikan seribu massa dengan menuntut penghapusan buruh harian lepas dan *outsourcing* serta menolak pemecatan sewenang-wenang. Peringatan dilakukan juga oleh serikat buruh perkebunan dan pertanian di Jambi. Di Gorontalo, lima ribu guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Gorontalo. PGRI menyasar Dinas Tenaga Kerja setempat dan kantor Gubernur Gorontalo dengan menuntut upah layak.

Pada 2014, 1 Mei diisi oleh seluruh serikat buruh untuk mendeklarasikan sikap politik dalam Pemilihan Presiden sekaligus mengungkapkan persoalan perburuhan. Serikat buruh terbelah pada tiga arus utama; serikat buruh yang memberikan dukungan kepada Calon Presiden Prabowo, serikat buruh yang memberikan dukungan kepada Calon Presiden Joko Widodo, dan serikat buruh yang berada di luar dukung mendukung pencalonan Presiden. Kelompok yang ketiga ini terbagi lagi dalam beberapa arus yang berbeda-beda. Diperkirakan sekitar 3,5 juta buruh memperingati 1 Mei yang tersebar dari Papua hingga Aceh.

Pada 2015, 1 Mei kembali diperingati oleh berbagai serikat buruh. Selain KPRI dan FPR, dalam perhelatan ini muncul aliansi baru, yaitu Gerakan Buruh Indonesia (GBI), sebuah aliansi luas federasi-federasi dan konfederasi serikat buruh di Jakarta. Selain memenuhi Bundaran Hotel Indonesia, depan Istana Negara, peringatan dilakukan pula di Gelora Bung Karno.

Ketika perhelatan May Day Fiesta di GBK berlangsung dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Sharron Burrow, salah satu buruh di kawasan industri, membakar diri. Banyak kalangan menduga bahwa latar belakang bakar diri tersebut sebagai bentuk protes terhadap semakin memburuknya kondisi kerja dan hubungan kerja.[21]

Periode 2006-2015, peringatan Hari Buruh Sedunia semakin popular di kalangan serikat buruh. Di spanduk, selebaran, poster, jaket maupun kaos buruh tertulis May Day disertai tuntutannya. Di balik semarak demonstrasi dan pertumbuhan serikat buruh, persoalan perburuhan pasca-2006 semakin banyak diwarnai oleh pelanggaran hak dasar. Namun, tuntutan-tuntutan seperti tuntutan 32 jam kerja seminggu, menolak hutang luar negeri, dan mencabut UUK Nomor 13 Tahun 2003, yang disuarakan pada 2000-an nyaris tidak disuarakan lagi.

---

[21] Syarif Arifin. *Sebastian, Isu Kesehatan Kerja dan Serikat Buruh.* 2015. Tersedia: http://lionindonesia.org/blog/2015/05/12/sebastian-isu-kesehatan-kerja-dan-serikat-buruh/

Soeharto dan Peringatan 1 Mei

Di awal berkuasanya, ketika mengganti Menteri Perburuhan menjadi Menteri Tenaga Kerja, Soeharto masih memperolehkan peringatan 1 Mei.

> "Kalau tidak ada peringatan, pasti terjadi geger yang *enggak* perlu. Saya putuskan, harus diperingati. Maka tanggal 1 Mei 1966, pemerintah Orde Baru ikut melakukan upacara tersebut. Tahun berikutnya langsung saya hapuskan. Kita cari Hari Buruh Nasional saja, tak perlu yang internasional, nanti malah harus nyanyi lagu Internasionale... segala," demikian kata Menteri Tenaga Kerja pertama rezim Soeharto, Komisaris Besar Polisi Awaloedin Djamin, seperti dilansir Kompas (7/5/2006).

"1 Mei itu Hari Buruh zaman Orde Lama. Dan sudah diganti dengan Hari Pekerja Nasional, 20 Februari, sejak tahun 1973," kata Bomer Pasaribu saat ditanyai pendapatnya mengenai peringatan Hari Buruh oleh PPBI di Semarang dan Jakarta, pada 1995 (Gatra, 13 Mei 1995).

Tidak ada informasi bagaimana rezim Soeharto memperingati hari buruh tersebut. Peringatan Hari Buruh dihapus setahun setelah Awaloedin Djamin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja pada 1966 (Adam, 2009: 131). Penulis tidak menemukan kebijakan resmi yang melarang secara langsung peringatan 1 Mei di zaman Soeharto.

Namun, dari berbagai fakta yang tersebar, tampaknya Soeharto menggunakan 'teknik memutar' untuk melarang 1 Mei. Selain itu dapat pula diduga bahwa 23 federasi serikat buruh yang mendeklarasikan diri pada 20 Februari 1973, secara internal memang tidak memiliki nilai solidaritas internasional.

> "... [P]emogokan yang biasanya dianggap sebagai senjata ampuh kaum buruh untuk memperjoangkan nasibnya bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga terasa tidak cocok dengan hubungan perburuhan Pancasila". (Pidato Soeharto, di Kongres Nasional I Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) di Istana Negara, Jakarta, 12/04/1980)

Kutipan di atas, memperlihatkan bagaimana aparatur ideologis Soeharto menghancurkan berbagai berbagai metode perlawanan yang berkembang pada zaman sebelumnya. Sehingga, peringatan Hari Buruh Sedunia dan bentuk-bentuk perlawanan buruh, seperti mogok, pawai, demonstrasi, *nggogol*, 'aksi cubit satu sakit semua', dan lain-lain dapat dengan mudah distigma tidak sesuai 'kepribadian Pancasila'.

1 Mei resmi diganti menjadi Hari Pekerja Nasional pada 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 tentang Hari Pekerja Nasional. Sampai tulisan ini dibuat, pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) masih meyakini bahwa hari tersebut merupakan hari bersejarah.

Sebelum penetapan Hari Pekerja Nasional, dalam pidato pembukaan hari ulang tahun SPSI ke-18 di Jakarta, 1991, Soeharto mengatakan:

> Hal ini akan dapat lebih mudah terwujud, jika kita memandang hubungan pekerja dan pengusaha sebagai mitra kerja dan bukan sebagai buruh dengan majikan. Suasana kerja semacam inilah yang ingin kita wujudkan melalui Hubungan Industrial Pancasila, yang telah kita kembangkan sejak 16 tahun terakhir. ...

> Hari kelahiran SPSI tanggal 20 Februari 1973, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan gerakan pekerja di Indonesia. Pada hari itu kaum pekerja Indonesia yang terpecah-pecah, melalui deklarasi pekerja Indonesia menyatakan dirinya untuk bersatu padu dalam satu organisasi.
>
> Karena itu saya tetapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional...”

Di luar menetapkan ideologi harmonisme, pidato di atas memperlihatkan kejanggalan penanggalan, yaitu penyebutan 20 Februari 1973 sebagai hari kelahiran SPSI. Padahal SPSI terbentuk pada 23-30 November 1985. Sementara tanggal 20 Februari adalah hari deklarasinya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Dalil yang kerap digunakan biasanya, SPSI adalah kelanjutan FBSI.

Menyebut diri sebagai ‘Orde Baru’ dengan mengusangburukkan rezim sebelumnya, ‘Orde Lama’, rezim Soerharto memiliki langkah-langkah jitu dalam menghancurkan kekuatan buruh. Salah satu model pengendalian serikat buruh yang masih cukup kuat hingga sekarang adalah model penarikan iuran dengan CoS (*Check of System*) dan keanggotaan otomatis. CoS adalah jenis penarikan iuran otomatis oleh manajemen. Jika keanggtotaan otomatis dapat ditelusuri dalam pikirannya Profesor Iman Soepomo, CoS adalah salah satu model iuran serikat buruh Jerman, DGB, yang diperkenalkan melalui seminar pada 1970.[22] Jenis pemungutan iuran ini dianggap paling ideal sebagai hasil kerjasama serikat buruh dan manajemen. Di tahun-tahun Kemerdekaan, serikat buruh memaksa manajemen agar memberikan dispensasi kerja kepada petugas pemungut iuran agar leluasa mengumpulkan iuran anggotanya. Dalam lima tahun terakhir, kita menyaksikan ketika serikat buruh melawan kebijakan perusahaan manajemen memboikot iuran serikat buruh. Di luar ancaman-ancaman eksternal kepada buruh, kita menyaksikan pula para pengurus serikat-serikat buruh mengalami kesulitan mendorong partisipasi anggota, sehingga harus menempuh ‘surat instruksi’.

1 Mei di Era Pra-Kemerdekaan

Seperti diketahui, federasi atau gabungan serikat-serikat buruh pertama adalah bernama PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh). Dibentuk pada 25 Desember 1919. Sebelumnya, 1918, ada usaha untuk mendorong persatuan dalam PKBT (Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani), sebuah perkumpulan yang membawahi petani perkebunan, kaum tani tak bertanah, buruh tani, dan buruh. Umur PKBT tidak lebih dari setahun.

PPKB terdiri dari 22 serikat buruh dengan 72 ribu anggota. PPKB didorong oleh kondisi meningkatnya gairah berorganisasi dan perlawanan di tanah Jawa dan Sulawesi menuntut peningkatan sewa tanah perkebunan kepada Belanda dan kenaikan upah di industri perkebunan. Meski umurnya hanya sampai Juni 1921, PPKB mampu menyusun program perjuangan yang melampaui zamannya. Selain menuntut pemerintahan sendiri dan penguasaan bank, transportasi, dan pabrik oleh negara, PPKB mencantumkan pentingnya delapan jam kerja untuk siang hari, maksimum lembur enam jam, ketentuan empat belas hari libur dalam setahun tanpa pengurangan upah, pengakuan hak berorganisasi, pembentukan pengadilan

[22] Catatan Seminar Perburuhan yang dilaksanakan oleh FES di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pada 5 s/d 24 Oktober 1970.

perburuhan, serta jaminan sosial seperti pensiun, perawatan, dan upah di waktu sakit.

Menurut penelusuran McVey, bangsa Tiong Hoa merupakan pelopor perayaan 1 Mei di Indonesia bahkan di Asia. Mereka tergabung dalam Kung Tan Hwee Koan dan memperingati peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1918 di Surabaya. Bersama bangsa India Tamil, dan Malaka, bangsa Tiong Hoa didatangkan oleh Belanda untuk menjadi kuli di pelabuhan, pertambangan dan perkebunan. Di luar temuan McVey, kita mendapati informasi bahwa orang-orang Tiong Hoa membangun organisasi buruh pada 1909 di Jakarta, yang dinamai dengan Tiong Hoa Sim Gie. Dari Jakarta, organisasi buruh bangsa Tiong Hoa menyebar ke Surabaya dan Semarang.

Informasi lain menyebutkan bahwa peringatan 1 Mei 1918 diperingati oleh kalangan serdadu dan kelasi di pelabuhan. Hal ini ditelusuri dari keberadaan Brandsteder kolega Sneevliet sebagai pekerja marinir dan redaktur surat kabar serdadu dan kelasi. Kerja-kerja Brandsteder dibantu oleh Sneevliet untuk membentuk "Dewan Matros dan Marine".[23] Penanda utama 1 Mei di masa ini adalah perubahan surat kabar Sinar Djawa menjadi Sinar Hindia dengan pergantian redaksi dari Sarekat Islam-Putih ke Sarekat Islam-Merah.

Sinar Hindia merupakan salah satu surat kabar kalangan pergerakan. Di media itu pula, pada 5 Mei 1920, Ki Hadjar Dewantara menerbitkan lagu *Internationale* ke dalam bahasa Melayu. Sejak itu *Internationale* tersebut kerap dinyanyikan di sekolah-sekolah yang diorganisasikan oleh kaum pergerakan, dan menjadi lagu pengiring peringatan 1 Mei.

Dalam narasi Soeharto, jarang disebutkan bahwa Ki Hadjar Dewantara, di umur 24 tahun dihukum dengan diasingkan ke Belanda. Ia dihukum karena menulis artikel yang bernada menyindir Pemerintah Hindia Belanda. Tulisannya, *Seandainya Aku Seorang Belanda*, diterbitkan dalam bahasa Belanda di surat kabar *De Expres*. Bersama Hadji Miscbach, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, menuntut Hindia Belanda merdeka. Ia terlibat dalam sejumlah pengorganisasian pemogokan buruh tani pada 1920-an, sehingga mengganti namanya dari Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menjadi Ki Hadjar Dewantara.

Seperti diterangkan dalam film *The Internationale* debutan Peter Miller pada 2000, lagu tersebut dinyanyikan oleh buruh dengan berbagai kecenderungan ideologi. Lagu ini awalnya berbahasa Perancis dikarang oleh Eugène Pottier pada 1871. Telah diterjemahkan ke dalam lebih dari seratus bahasa di dunia. Di Indonesia, ada tiga versi terjemahan lagu *Internationale*, namun yang sering dinyanyikan adalah terjemahan karya Ki Hadjar Dewantara. Terjemahan lain adalah karya A. Yuwinu dengan merujuk pada bahasa Mandarin dan Rusia. Pada 1971, Soepono, Utuy Tatang Sontani, Suar Soroso, Agus J. membuat terjemahan lagi dengan mendasarkan pada bahasa Perancis, Rusia, Inggris, Mandarin, Jerman, dan Belanda.

[23] Lihat Dipa Nusantara Aidit, Sejarah Gerakan Buruh Indonesia: Dari Tahun 1905 Sampai Tahun 1926. Djakarta. 1952. Jajasan Pembaruan. Lihat Pula *Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula*. Bandung. 2016. Ultimus.

Seperti ditulis oleh Rudi Hartono dalam berdikarionline.com (1/5/2011) dan Fajar Riadi dalam Historia.co.id (2/5/2013), peringatan hari buruh sedunia di Hindia Belanda secara rutin diperingati sejak 1918 hingga 1926. Peringatan tersebut meredup menjelang pecahnya perlawanan 1926-1927. Kala itu, peringatan 1 Mei mengangkat persoalan jam kerja yang lama, dihapusnya bonus sampai terpenuhinya kenaikan gaji, penanganan perselisihan oleh badan arbitrase, serta pelarangan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan.

1 Mei 1924 peringatan Hari Buruh diperingati di Gedung Sarekat Islam Semarang di Kampung Gendong. Surat kabar *Sinar Hindia* 2 Mei 1924, melaporkan acara tersebut dimulai pukul pukul 07.45 pagi dan berakhir pukul 12.00 malam. Acaranya diisi dengan pidato dari pimpinan organisasi rakyat, ada pula orkes dan sandiwara.

Di luar yang ditulis Riadi dan Rudi, kita menemukan sebuah laporan yang ditulis oleh S.M Kartosoewirjo (1907-1962) dalam surat kabar *Fadjar Asia* tertanggal 6 Mei 1929. Dalam laporan tersebut Kartosoerwirjo menuliskan peringatan 1 Mei yang dilaksanakan oleh Sociaal Democratische Partij (I.S.D.P.). ISDP memperingati 1 Mei dengan melakukan rapat akbar yang diikuti oleh 1000 orang. Rapat tersebut dimulai pukul 9.30 hingga 11.30. Dalam Pertemuan tersebut diungkapkan pula mengenai pentingnya penghapusan kerja rodi, penghapusan keistimewaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pembebasan tahanan politik, kebebasan berorganisasi dan berpendapat bagi rakyat Hindia Belanda.

Peringatan 1 Mei di Masa Kemerdekaan

Semaoen (1899-1971) di umur 12 tahun telah menjadi buruh di perusahaan kereta api negara (s*taatsspoor*), sebagai juru ketik. Berdasarkan peraturan Hindia Belanda (*Staatsblad* 1910 No. 406), orang-orang seusia Semaoen diperbolehkan direkrut di dunia kerja. Usia muda tersebut, lelaki maupun perempuan, dipekerjakan di sektor perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan di waktu siang dan malam.[24] Usia muda dan jam kerja panjang terdapat pula di sektor perkebunan Sumatera Timur. Buruh-buruh di perkebunan direkrut oleh *werek,*[25] sebuah lembaga penyedia jasa tenaga kerja yang dibiayai oleh perusahaan perkebunan. Melalui *werek* tenaga kerja usia muda dari Pulau Jawa direkrut untuk bekerja di perkebunan. Karena itu, di masa itu tidak terlalu aneh jika banyak buruh usia muda terlibat dalam pergerakan. Namun dengan pembatasan usia yang luas itu, rakyat Hindia Belanda telah dirampas masa mudanya untuk menghidupkan roda industri. Mereka bekerja 10 hingga 16 jam per hari tanpa hari libur. Usia kerja merupakan peluang bagi ketersediaan calon buruh dan jam kerja merupakan pintu bagi peningkatan keuntungan.

[24] Meski industrialisasi telah dimulai pada 1870, peraturan perburuhan yang disebut dengan *Koeli Ordonnantie* baru keluar pada 1880. Awalnya peraturan tersebut hanya berlaku di perkebunan Sumatera Timur. Setelah itu, peraturan tersebut diberlakukan pula untuk Aceh (1916); Kalimantan Barat dan Maluku (1918), Sulawesi (1925). Di kala itu, setiap industri memiliki peraturan masing-masing. Pada 1933, *Koeli Ordonnantie* di tiap sektor dipersatukan. *Koeli Ordonnantie* dihapus pada 1942 dengan datangnya Jepang.

[25] *Werek* mencari tenaga kerja dengan cara mengirim petugas ke kampung-kampung di Pulau Jawa atau memasang iklan di surat kabar untuk dikirim ke Sumatera. Sekarang *werek* mirip dengan PJTKI atau yayasan tenaga kerja. Kala itu, *werek* merekrut buruh dengan cara menipu, di mana calon buruh diiming-imingi sejumlah kekayaan dan kemegahan jika bersedia bekerja.

Keadaan di masa Jepang lebih parah. Setelah menguasai Hindia Belanda, Jepang menutup perusahaan yang dianggap tidak mendukung Perang Pasifik.[26] Setiap keluarga di Jawa diwajibkan mengirimkan anak lelakinya mengikuti program *romusha* atau tenaga kerja. Di tempat kerja terjadi kekurangan makanan dan pakaian. *Romusha-romusha* tersebut hanya menggunakan celana dari karung goni. Banyak di antara *romusha* meninggal di tempat kerja, karena sakit, kecapaian dan kecelakaan. Sementara bagi perempuan dipaksa dari rumahnya untuk menjadi *jugun ianfu* (pemuas seksual) tentara Jepang. Di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya,[27] perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih oleh Jepang. Para buruh bekerja rodi, tanpa mendapat upah, hanya makan singkong, atau memakan nasi sisa tentara Jepang. Karena Jepang melarang organisasi buruh, perlawanan bergerak di bawah tanah atau menyamar di dalam berbagai organisasi yang tersedia.

Dari penggambaran di atas, masa Kemerdekaan merupakan salah satu upaya membalikkan sistem perburuhan kolonial. Masa Kemerdekaan, melalui UU Kerdja Nomor 12 Tahun 1948 berupaya memotong akumulasi kapital dengan memperkenalkan pembatasan usia, pengurangan jam kerja, larangan bekerja malam dan di pertambahan untuk perempuan dan anak-anak, waktu istirahat, melarang buruh anak, memberikan hak cuti dan waktu libur, dan menjadikan 1 Mei sebagai hari raya buruh tanpa pengurangan upah, pemecatan terhadap buruh mesti seizin negara, dan buruh diperbolehkan meninggalkan atau menuntut perusahaan jika tidak memenuhi hak buruh. Peraturan perburuhan, dan memberikan landasan perlindungan kepada buruh dengan membatasi kekuasaan pemilik modal.

Di masa Kemerdekaan sekali waktu serikat-serikat buruh harus terpecah karena terjadi agresi Belanda, ada peristiwa Madiun dan pembentukan negara Indonesia Serikat. Namun, semuanya memberikan perhatian luas mengenai pentingnya membalikkan keadaan perburuhan dari zaman penjajahan ke zaman Kemerdekaan. Karena itu, seperti diilustrasikan oleh Iskandar Tedjasukmana (2008: 62), seluruh serikat buruh di masa Kemerdekaan dengan bahasa dan landasannya masing-masing mencantumkan cita-cita sosialis dan mencela sistem kapitalisme dalam program perjuangannya.

Berkenaan dengan peringatan 1 Mei di masa Kemerdekaan, setidaknya dapat dibagi dalam dua periode, yakni masa-masa pembentukan, yaitu dari 1946-1950 dan masa penataan, yakni pada periode 1951-1965. Penulis membaginya dengan sembarangan dan hanya merujuk Peristiwa Madiun, di mana beberapa pimpinan SOBSI dihukum mati oleh Pemerintahan Soekarno-Hatta dan pembatalan sepihak Konferensi Meja Bundar (KMB), yang melahirkan inisiatif pendudukan pabrik-pabrik besar Belanda oleh serikat-serikat buruh. Selain itu, pada 1951, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948.

Di masa Kemerdekaan 1 Mei diperingati di bawah ancaman agresi militer Belanda. Karena itu, selain menyerang kekuasaan Belanda, 1 Mei diperingati dengan cara mendesakkan sejumlah tuntutan untuk dilaksanakan oleh negara. Untuk menyambut 1 Mei, serikat-serikat buruh membentuk panitia khusus, membuat

[26] Lihat Moenadi. *Kisah Moenadi: Otobiografi dan Tulisan-tulisannya*. Bandung. 2012.
[27] Razif. Buruh Pelabuhan Tandjung Priok. Institut Sejarah Sosial Indonesia.
Tersedia di: http://www.scribd.com/doc/28545199/Razif-Buruh-Tanjung-Priok

kursus-kursus, dan ada pula yang membangun kerjasama dengan organisasi di luar buruh.

Kurun 1950-an kiranya menjadi penting. Setelah memasuki pembentukan serikat buruh, muncul larangan pemogokan di perusahaan vital negara dengan ancaman 3 tahun penjara. Peraturan tersebut dikukuhkan oleh Perdana Menteri Pertahanan ad-interim Mohammad Natsir, pada 13 Februari 1951 melalui Peraturan Kekuasaan Militer Pusat Nomor 1. Di kala demikian, sampai 1957, peringatan 1 Mei dilakukan dengan mengajukan tuntutan pencabutan peraturan tersebut. Selain itu, di periode tersebut pula serikat-serikat buruh mencatatkan sejarah mengenai pentingnya tunjangan hari raya di perusahaan negara dan perusahaan swasta. THR (tunjangan hari raya) merupakan jerih payah gerakan buruh pada 1950-an dan menjadi hukum positif pada 1960-an hingga sekarang (Suryomenggolo, 2009: 217).

Di periode 1950-an pula, Pemerintah Indonesia berkali-kali meminta Belanda menyerahkan Irian Barat. Perundingan demi perundingan yang melibatkan berbagai pihak pun ditempuh. Belanda keras kepala. Pada 18 November 1957 diadakan rapat umum di Jakarta. Rapat tersebut menjadi pendorong pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Menteri Penerangan Soedibjo dan Presiden Soekarno berorasi hebat. Wakil Presiden Muhammad Hatta tidak hadir, tapi menitipkan naskah pidato. Dibanding Soedibjo dan Soekarno, menurut penulis, pidato Hatta lebih lembek. Namun ada yang menarik untuk dikutip dan tidak disampaikan oleh pidato dua orang sebelumnya. Setelah terheran-heran dengan kekeraskepalaan Belanda, Hatta berkata:

> "... [S]alah satu djalan jang besar effeknja diluar negeri adalah sebagai berikut. Sehari sebelum masalah Irian Barat diperbintjangkan dalam rapat-rapat PBB, misalnya tepat pukul 10 pagi djam waktu proklamasi –diadakan serentak seluruh Indonesia "pemogokan" jang misalnja, hanja lima menit lamanja. Pada saa itu semua buruh dan pegawai pada perusahaan partikulir atau djabatan negeri, berhenti bekerdja untuk selama 5 menit dan menundjukan segala perhatiannja kepada Irian Barat."

Ilustrasi Hatta menyarankan pemogokan kepada seluruh buruh untuk mogok selama limat menit. Barangkali atas dasar pidato tersebut, Menteri Penerangan, sekaligus Ketua Panitia Pembebasan Irian Barat pada 1 Desember 1957, menginstruksikan kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda untuk mengadakan pemogokan pada 2 Desember 1957 selama 1 hari penuh. Merespons instruksi tersebut, anggota-anggota serikat buruh lebih cergas. Buruh tidak hanya mogok, tapi melakukan pendudukan, mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda dan mengusir manajer-manajer Belanda. Kegiatan tidak satu hari, apalagi lima menit, tapi berlangsung 3 hingga 13 Desember 1957, yakni sebelas hari (Sandra, 1961: 135). Dari 1957 hingga 1960, terlaporkan sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi, yang berarti sekitar 70 persen perusahaan dari seluruh perusahaan asing. Setahun setelahnya baru muncul UU Nomor 86 Tahun 1958, tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda. Dengan begitu, seperti halnya UU Kerdja Nomor 12 Tahun 1948, perintah nasionalisasi pun lahir atas dorongan gerakan buruh. Sampai di sini dapat dikatakan seandainya tidak ada dorongan nasionalisasi oleh serikat buruh, hingga saat ini masyarakat Indonesia tidak akan pernah memiliki badan usaha miliki negara (BUMN).

Foto: Peringatan 1 Mei 1948 di Yogyakarta. Soekarno menyambut buruh yang melakukan pawai dan berpidato. Dalam peringatan tersebut, Soekarno berpesan bahwa kaum buruh dan kaum tani yang jumlahnya mencapai 90 persen rakyat Indonesia harus menjadi motor dan soko guru dalam masyarakat adil dan makmur.
Sumber: Koleksi Foto Antara

Jafar Suryomenggolo dalam *Bagaimana 1 Mei Dirayakan Pada Masa Lalu* (?): *Studi Perayaan Hari Buruh 1946-1947* menjelaskan, serikat-serikat buruh di awal Kemerdekaan memaknai 1 Mei sebagai hari kemenangan buruh Indonesia dan buruh di dunia dalam melawan kapitalisme. Untuk di masa itu, peringatan 1 Mei 1946 dilakukan dengan mendesak pemerintah agar menjadikan 1 Mei sebagai hari raya buruh tanpa pengurangan upahnya. Pemerintah di masa itu menyerukan badan-badan pemerintah turut serta dalam perayaan tersebut. Di Pati Jawa Timur, peringatan 1 Mei 1946 dilakukan dengan melaksanakan rapat raksasa dan pawai. Selain itu, diadakan pula gerakan pengumpulan bahan pakaian, obat-obatan untuk membantu fakir-miskin dan bekas *romusha*. Gerakan pengumpulan tersebut tampaknya dilandasi oleh keprihatinan sulitnya mendapatkan bahan makanan pokok akibat tindakan boikot pemerintah Belanda.

Pada 1947, 1 Mei disambut di wilayah Indonesia, yang berada di bawah perjanjian Linggarjati (15 November 1946 - 25 Maret 1947), yaitu di Jawa, Sumatera, dan Madura. Di Yogyakarta, 1 Mei dihadiri oleh sekitar 200-300 ribu orang yang terdiri dari buruh, tani, dan pemuda. Kegiatan yang dilaksanakan di alun-alun tersebut dihadiri pula oleh Menteri Perburuhan dan Sosial Kusnan, Harjono dari SOBSI, dan Amir Syarifudin dari Pesindo, Hadir pula dalam rapat raksasa tersebut Wakil Presiden dan Panglima Besar Sudirman. Setelah rapat raksasa, massa melakukan pawai, dan setelah itu menyaksikan peletakan batu pertama 'Tugu Pahlawan' di samping gedung Antara di Ngabean.

Di bawah perjanjian Renville (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948), 1 Mei 1948 disambut di Magelang, Purworejo, Madiun, Kediri, Blitar, Cepu, Bojonegoro, Pati, dan Sumatera. Serikat buruh melakukan pawai, perlombaan, dan pertunjukkan. Peringatan juga dilakukan dengan rapat umum di lapang Atas Ngarai, dan pawai keliling kota. Di Kotaraja (Banda Aceh), peringatan Hari Buruh dilakukan dengan cara resepsi besar.

Di Sumatera, 1 Mei 1948 diperingati lebih meriah, karena ada pesawat terbang yang menaburkan surat ucapan selamat 1 Mei. Menariknya, 1 Mei 1948 di Sumatera Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) baru berlaku. Padahal di

Jawa uang tersebut telah berlaku pada 1946. Ide membuat mata uang dengan nilai dan bentuk mandiri muncul tiga bulan setelah Indonesia berproklamasi. Serikat buruh percetakan G. Kolf & Co., mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan mata uang agar Indonesia tidak bergantung pada uang Belanda dan Jepang. Bahkan, serikat buruh percetakan tersebut telah menyiapkan desain mata uang dan mempersilakan pabrik yang dikuasainya dipergunakan untuk mencetak uang. Akhirnya pemerintah membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia), di mana serikat buruh percetakan, bersama Direktur Bank Rakyat Indonesia, Kementerian Penerangan, dan Kementerian Keuangan menjadi anggota panita tersebut. Akhir Oktober 1946, uang tersebut beredar di Yogyakarta.

Di Jakarta, 1 Mei 1952 ditandai dengan dua rapat besar dan pawai. Di Jember Jawa Timur, serikat buruh mengadakan rapat raksasa. Hadir dalam rapat tersebut kaum buruh, kaum tani, pemuda/pelajar, kaum wanita, dan golongan intelektual. Rapat tersebut menuntut pencabutan Undang-Undang Darurat No. 16/1951. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa undang-undang tersebut mengekang hak-hak demokrasi dan menguntungkan pemilik modal. Selain itu, diungkapkan pula agar pemerintah menaikkan upah buruh, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan membatalkan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pada Desember 1961, serikat-serikat buruh membangun aliansi. Aliansi tersebut terdiri dari empat konfederasi besar, yakni SOBSI, KBKI, SARBUMUSI, GOBSI-INDONESIA, dan GASBIINDO. Aliansi tersebut dinamai dengan Sekretariat Bersama Perjuangan Buruh Pelaksanaan TriKomando Rakyat. Pada 1 Mei 1962, Sekber tersebut turut serta dalam perjuangan mengusir Belanda di Irian Barat dan memperingati 1 Mei di Istana Negara.

Pada 1965, *May Day* dilaksanakan dengan melakukan rapat raksasa di Gelora Bung Karno, dihadiri oleh ribuah buruh. Saat itu, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai pentingnya persatuan melawan imperialisme.

Foto: Peringatan 1 Mei 1965 di Gedung Olah Raga Jakarta (Sekarang Gelora Bung Karno). Soekarno mengatakan bahwa imperialisme dan kapitalisme itu jahat dan harus dilawan. Sumber: Koleksi Bettmann/CORBIS

Penutup: Keppres 24 dan 1 Mei

May Day menjadi momen penting bertemu serikat-serikat buruh maupun non-serikat buruh. Saat ini, kita bisa menyaksikan barisan buruh yang tertata rapih ketika memperingati *May Day*, poster dan spanduk yang warna-warni, topeng-topengan yang menyerupai pejabat negara, teatrikal dan lain sebagainya. Beberapa serikat buruh di Jabodetabek bahkan membuat membuat persiapan khusus untuk menyambut *May Day*, seperti melatih 'pasukan khusus', membuat rangkaian diskusi, menyebarkan selebaran, dan melakukan demonstrasi pra-*May Day*.

Seperti tergambar di atas, di setiap peringatan 1 Mei tak kurang dari enam sampai sebelas tuntutan diajukan di kantor-kantor pemerintahan, kawasan industri maupun tempat-tempat umum lainnya. Menariknya, jika 1 Mei bertepatan dengan hari libur seperti hari Minggu, serikat-serikat buruh akan tetap memperingati hari tersebut di hari yang sama maupun di hari yang berbeda. Meski ada serikat-serikat buruh yang memperingati 1 Mei dengan cara seminar dan jalan santai, yang paling menonjol adalah peringatan 1 Mei dengan metode pawai, parade, dan rally massa.

Ada dua ciri yang menonjol dari peringatan 1 Mei oleh serikat-serikat 'lama' dengan serikat 'baru', yaitu dalam nyanyian, slogan, dan yel-yel.[28] Serikat-serikat 'lama' seringkali memutar musik dan lagu yang sudah tersedia dan tak jarang merupakan modifikasi dari lagu-lagu yang umum dalam bentuk bentuk MP3 (*Moving Picture Experts Group Layer-3 audio*) dan menghadirkan penyanyi terkenal, seperti Ahmad Dhani, grup band Slank, dan Nidji. Para orator pun biasanya adalah para aktivis yang sudah lama menguasai lapangan. Dengan skema demikian, partisipasi peserta *May Day* seringkali hanya terlihat dalam acara joget dan turut meneriakan yel-yel. Serikat-serikat 'baru' bernyanyi bersama dengan suara yang seadanya dengan lirik dan nada yang hanya dikenal di kalangan aktivis. Selain mengundang seniman kurang terkenal, peringatan 1 Mei seringkali diramaikan dengan hasil karya seni anggotanya atau dari pekerja seni dalam kelompok tertentu. Menampil para orator baru seringkali dianggap penting oleh serikat 'baru'.

Dalam konteks aksi massa sebagai wahana pendidikan, penggunaan simbol, yel-yel, dan slogan seringkali memiliki pengaruh cukup mendalam bagi pembentukan karakter buruh. Karena itu, sangat penting membuat desain demonstrasi yang memberikan kesempatan luas bagi para anggota biasa agar dapat terlibat secara langsung.

Di luar semakin meluasnya pelanggaran hak dasar buruh, penjelasan lain dari menguatnya protes buruh dalam 1 Mei adalah munculnya 'generasi baru' di serikat buruh 'lama' maupun 'baru'. 'Generasi baru' ini adalah para buruh yang dibesarkan di masa pergolakan pada periode 1990-an, mendapatkan kemudahan akses informasi, menikmati berkah reformasi politik dan harus menghadapi kesulitan hidup di periode 2006 serta tidak terlalu peduli dengan berbagai stigma yang ditanamkan oleh Soeharto. 'Generasi baru' ini adalah golongan yang memasuki dunia kerja melalui pintu sistem kerja kontrak atau *outsourcing*.

---

[28] Mengenai karakter kesenian dalam konteks perjuangan, lihat Syamsul Barry. *Radikalisme dalam Seni: Seni Pada Aksi Unjuk Rasa Turun Jalan*, dalam *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia*. Budi Susanto, S.J (ed.). Yogyakarta. Kanisius. 2003

Mulai 2014, 1 Mei diakui sebagai hari buruh internasional dan merupakan hari libur, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Isi Keppres 24 cukup ringkas; hanya menetapkan 1 Mei sebagai hari libur untuk memperingati Hari Buruh Internasional.

Keluarnya Keppres 24 Tahun 2013 telah mematahkan anggapan keliru bahwa 1 Mei merupakan hari liburnya negara-negara Komunis dan peringatannya orang-orang Komunis. Kesan lain dari pengakuan 1 Mei sebagai hari libur nasional adalah upaya mengakomodasi tuntutan gerakan buruh, untuk menghindari pemenuhan tuntutan lainnya. Dalam rangka mengendalikan buruh dan menjaga tingkat keuntungan kapital, pemerintah merasa perlu menetapkan 1 Mei sebagai hari libur. Karena itu, wajar jika penetapan 1 Mei sebagai hari libur tidak secara tegas dan langsung mencabut Keppres Nomor 9 Tahun 1991, yang menetapkan 20 Februari sebagai hari pekerja nasional.

Politik akomodasi lainnya dapat ditemukan dalam acara-acara 'silaturahmi May Day' atau spanduk-spanduk ucapan selamat aparat polisi dan perusahaan, yang selalu menyelipkan pesan tidak berdasar, 'tidak boleh anarkis' dan 'mitra kerja'. Tahun 2013, Forum Investor Bekasi menyiasati 1 Mei dengan mengadakan Zikir Bersama dengan mengundang Ustaz Arifin Ilham dan Menteri Agama Suryadharma Ali dan para petinggi serikat buruh. Di daerah lain, Pemerintah Daerah mengajak beberapa serikat buruh untuk memperingatinya dengan upacara bendera, dialog interaktif, sunatan masal, menanam pohon, jalan santai, membersihkan jalan, atau membuat panggung hiburan dengan *door prize*.

Kita dapat memperkirakan penerapan Keppres 24 di lapangan khususnya kepada buruh-buruh yang sifat pekerjaannya tidak dapat diliburkan. Para pemimpin serikat buruh mengemban amanat untuk memastikan buruh-buruh yang jenis pekerjaannya demikian dan buruh-buruh yang bergantung upah pada satuan hasil tetap mendapatkan hak-haknya. Artinya, jika dihari tersebut buruh dipekerjakan, pengusaha wajib menghitungnya sebagai upah lembur, seperti diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 85.

Di luar persoalan di atas, yang perlu didiskusikan adalah mengenai delapan jam kerja atau 40 jam seminggu. Delapan jam kerja merupakan isu yang diangkat pada awal abad 19 dan baru diakui secara berbeda-beda di awal abad ke-20. Dalam praktik, dengan alasan untuk menilai produktivitas dan performa kinerja, penerapan delapan jam kerja seringkali dikombinasikan dengan sistem target, sistem kehadiran, sistem shift, dan jam lembur.[29] Waktu kerja adalah satuan waktu yang diperhitungkan sejak buruh berada di pabrik.[30] Di beberapa kasus seringkali kita menemukan buruh diharuskan masuk beberapa menit sebelum jam kerja.[31] Politik produksi lainnya adalah menggenjot produksi sebelum hari libur tiba.

---

[29] Jam kerja lembur paling diminati karena perhitungan kelipatan upahnya yang menawan. Buruh galangan kapal di Batam, mendapatkan upah lembur hampir tiga kali lipat dari upah pokoknya. Catatan diskusi dengan serikat pekerja pelayaran dan jasa maritim, misalnya, Mei 2013

[30] Rerata buruh perempuan di perusahaan percetakan dan pengemasan di Bekasi harus bersiap dua jam sebelum keberangkatan. Buruh yang telat masuk kerja bisa dikenai sanksi dari peringatan hingga pemecatan. Catatan lapangan Forum Belajar Perempuan FSP PPMI SPSI Bekasi Raya, 23 Februari 2014. LIPS

[31] Waktu kerja ditetapkan 40 jam kerja dalam seminggu, yang diatur menjadi 6 hari atau 5 hari. Lebih dari itu disebut sebagai lembur.

Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja di Indonesia yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu semakin meningkat tiap tahun. Pada 2007, jumlah pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu sebanyak 29.232.506 orang dengan perincian 20,5 juta orang di antaranya lelaki dan 8,7 juta adalah perempuan. Kemudian pada 2009, jumlah pekerja yang bekerja di atas 48 jam per minggu meningkat menjadi 29.825.441 orang dengan perincian 20,3 juta adalah pekerja lelaki dan 9,4 juta pekerja perempuan. Pada 2009, BPS mencatat jumlah pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu sebanyak 30,02 juta pekerja. Perinciannya, 20,6 juta pekerja lelaki dan 9,3 juta pekerja perempuan.

Penjelasan utama dari meningkatnya waktu kerja sekaligus menurunnya pendapatan buruh adalah skema pasar kerja fleksibel dalam bentuk hubungan kerja kontrak jangka pendek dan *outsourcing*. Dalam praktik hubungan kerja tersebut mewujud dalam buruh harian lepas, buruh borongan dan buruh rumahan. Pada 2015, karena berulang kali gagal merevisi UUK Nomor 13, pemerintah memperkenalkan formula pengupahan yang disesuaikan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hubungan kerja fleksibel dan upah fleksibel akan semakin menyulitkan buruh mendapatkan kepastian kerja dan kepastian pendapatan.

Rupanya tuntutan pengurangan jam kerja tanpa pengurangan upah di abad 21 ini sudah jarang didiskusikan di kalangan serikat buruh. Padahal, waktu merupakan media untuk pelipatgandaan keuntungan kapital. Sementara upah buruh diperhitungkan dengan angka kebutuhan bulanan dari harga barang pasar, barang-barang dipabrik diproduksi dengan satuan detik, di mana jutaan keuntungan dikumpulkan. Dengan demikian, tampaknya menuntut kenaikan upah saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pengurangan jam kerja dan penurunan target kerja. Begitulah tuntutan May Day yang disuarakan pada peristiwa Haymarket pada 1886.

Rujukan

Website

RUU Unjuk Rasa. Tajuk Republika, 29/4/1995. Kliping Mogok Kerja 95. LIPS

Wakil Presiden: Peringati Hari Buruh Dengan Baik dan Gembira. Diunduh pada 10/03/2014, dalam http://www.tempo.co/read/news/2006/04/29/05576797/Wakil-Presiden-Peringati-Hari-Buruh-Dengan-Baik-dan-Gembira. Sabtu, 29 April 2006 | 00:13 WIB

International Workers' Day. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Workers'_Day

Bachin, Robin. *The Haymarket Martyrs' Monument as a Labor Icon*. Tersedia online: http://www.illinoislaborhistory.org/labor-history-articles/the-haymarket-martyrs-monument-as-a-labor-icon

Jentz, John B. Eight-Hour Movement. Tersedia: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/417.html

The International Working Men's Association. *Resolutions of the Congress of Geneva, 1866, and the Congress of Brussels, 1868*. London. The Westminster Printing Company, 5 6, and 122, Drury Lank, W.C.

Novack, George. *Sejarah Internasional Pertama dan Internasional Kedua*. Terj. Abdul Syukri. 1999. Tersedia: https://www.marxists.org/indonesia/archive/novack/001-2.htm
Hilmar Farid. *May Day: Perayaan atau Peringatan*. Tersedia: http://hilmarfarid.com/wp/mayday-perayaan-atau-peringatan/
Front Perjuangan Rakyat. *Mayday Fiesta: Terlalu Sengsara untuk Berpesta*. Tersedia: https://fprsatumei.wordpress.com/2008/05/01/mayday-fiesta-terlalu-sengsara-untuk-berpesta/
Pernyataan Resmi Konfederasi KASBI keluar dari keanggotaan Aliansi Buruh Menggugat (ABM). Nomor : 64/PP-KASBI/VI/2010. 16 Juni 2010. Diunduh dari https://groups.yahoo.com/neo/groups/jaringan_L2P/conversations/topics/2101.
Syarif Arifin. *Sebastian, Isu Kesehatan Kerja dan Serikat Buruh*. 2015. Tersedia: http://lionindonesia.org/blog/2015/05/12/sebastian-isu-kesehatan-kerja-dan-serikat-buruh/
Catatan Seminar Perburuhan yang dilaksanakan oleh FES di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pada 5 s/d 24 Oktober 1970. Tersedia: http://www.acehbooks.org/pdf/ACEH_03636.pdf
Razif. *Buruh Pelabuhan Tandjung Priok*. Institut Sejarah Sosial Indonesia. Tersedia di: http://www.scribd.com/doc/28545199/Razif-Buruh-Tanjung-Priok
Chase, Eric. The Origins of May Day. 1993. http://www.iww.org/history/library/misc/origins_of_mayday.
20 ribu aparat kawal Jakarta. Media Indonesia, 29/4/2006. Kliping Aksi 2006. Perpustakaan Perburuhan LIPS.
Awaloedin Ubah Buruh Jadi Pekerja: Kenangan Pribadi atas Semua Presiden. 7 Mei 2006. Tersedia dalam: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/08/nasional/2633080.htm
Demonstrasi Buruh: Aksi Satu Mei di Semarang. Majalah GATRA. 13 Mei 1995. Perpustakaan Perburuhan LIPS.
Hartono, Rudi. *Sekilas Sejarah Hari Buruh Sedunia di Indonesia*. 1/5/2011. Diunduh dari http://www.berdikarionline.com/lipsus/liputan-khusus-bedah-eko-pol/20110501/sejarah-hari-buruh-sedunia-di-indonesia.html. 23/3/2014
Jam Kerja Orang Indonesia Tak Kalah Panjang. Diunduh pada 13/03/2014. http://suar.okezone.com/read/2010/03/08/283/310269/jam-kerja-orang-indonesia-tak-kalah-panjang. Senin, 08 Maret 2010 14:11 wib.
Karena Dicetuskan Karl Marx, Libur Nasional 1 Mei Tak Layak. Diunduh pada 10/03/2014, dalam http://www.antaranews.com/berita/32783/karena-dicetuskan-karl-marx-libur-nasional-1-mei-tak-layak. Senin, 1 Mei 2006 12:04 WIB
Pidato Soeharto di hadapan peserta kongres nasional I Federasi Buruh Seluruh Indonesia, 12 April 1980. Diunduh pada 23/03/2014 dari http://www.scribd.com/doc/194497960/Pidato-1980-30
Radio Nederland Wereldomroep. *Hari Buruh Internasional Organisasi Buruh yang Terpecah*. Tersedia online: diunduh pada 10/03/2014, dalam http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/hari_buruh_internasional070501-redirected. 01-05-2007.
Riadi, Fajar. *Jejak Buruh di Awal Mei: Mulanya menuntut pengurangan jam kerja. Kini ramai menuntut dihapusnya alih daya*. 2/5/2013. Diunduh pada 22/03/2014, dari http://historia.co.id/artikel/persona/1216/Majalah-Historia/Jejak_Buruh_di_Awal_Mei

Undang-Undang

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Kerdja Nomor 12 Tahun 1948
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Kembali Undang-Undang Kerdja Nomor 12 Tahun 1948

Buku, Catatan lapangan dan wawancara

Iskandar, Mohammad. *"Oeang Republik" dalam Kancah Revolusi*. Jurnal Sejarah Vol. 6, No. 1, Agustus 2004.
McVey, Ruth. 2009. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta. Komunitas Bambu.
Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
Sandra. 1961. *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Djakarta. Pustaka Rakjat.
Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.
Sulistyo, Bambang. 1995. *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
Suroso, Suar. *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*. Bandung. Ultimus.
Mizuno, Kosuke. 2007. Direktori Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia. 2007. Bandung dan Jepang. Akatiga dan CSEAS
Aidit, Dipa Nusantara. 1952. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia: Dari Tahun 1905 Sampai Tahun 1926*. Djakarta. Jajasan Pembaruan.
Yatmaka, Yayak. dkk. *Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula*. Bandung. 2016. Ultimus.
Moenadi. *Kisah Moenadi: Otobiografi dan Tulisan-tulisannya*. Bandung. 2012.
Barry, Syamsul. *Radikalisme dalam Seni: Seni Pada Aksi Unjuk Rasa Turun Jalan*, dalam *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia*. Budi Susanto, S.J (ed.). Yogyakarta. Kanisius. 2003
Cahyono, Edi. *Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan: Studi Karesidenan Pekalongan 1830-1870* dalam Prisma, No. 11/1991
China in Crisis; Volume 2. *China's Policies in Asia and America's Alternatives*. Tang Tsou,Ping-ti Ho. University of Chicago, 1969
Kementerian Penerangan RI. *Djangan ragu-ragu lagi!: Amanat-amanat Presiden Soekarno, Moh. Hatta dan pidato pembukaan Soediro pada rapat rakjat diselenggarakan oleh Panitya Aksi Pembebasan Irian Barat, Daerah Kotapradja Djakarta Raya tanggal 18 Nopember 1957, di Lapangan Banteng.*
Konfederasi KASBI: Dibangun dari Serikat Buruh Tingkat Kota dan Provinsi. Bintang Buruh KASBI. Oktober 2009.
Pernyataan Sikap ABM 2006. Koleksi Khamid Istakhori.Perpustakaan Perburuhan LIPS. Bogor.
Pernyataan sikap Komite Aksi Satu Mei 2000. Perpustakaan Perburuhan LIPS.
Catatan Wawancara dengan Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi Asep Djamaludin, 13 dan 14 Mei 2013.
Jafar Suryomenggolo. *Dinamika Perumusan UU Ketenagakerjaan dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Apa, Siapa dan Bagaimana*. Discussion Paper No. 1. Jakarta. TURC. Cetakan II April 2007

Laporan Diskusi, "Strategi Menghadapi Buruh *Outsourcing*," di Kawasan Bekasi. LIPS dan Akatiga, 3/21/2011

Film

Film Dokumenter, *Bekasi Bergerak*. Bogor. LIPS dan KoPI. 2013
Film Dokumenter *The Internationale.* Peter Miller. 2000